

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan paling penting dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya. Otonomi Daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI nomor.38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang menyatakan bahwa, “Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 sebagai amandemen dari undang-undang nomer 18 tahun 1997 mengenai pengesahan undang- undang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Pasal 1 ayat 6UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, sedangkan Retribusi Daerah Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

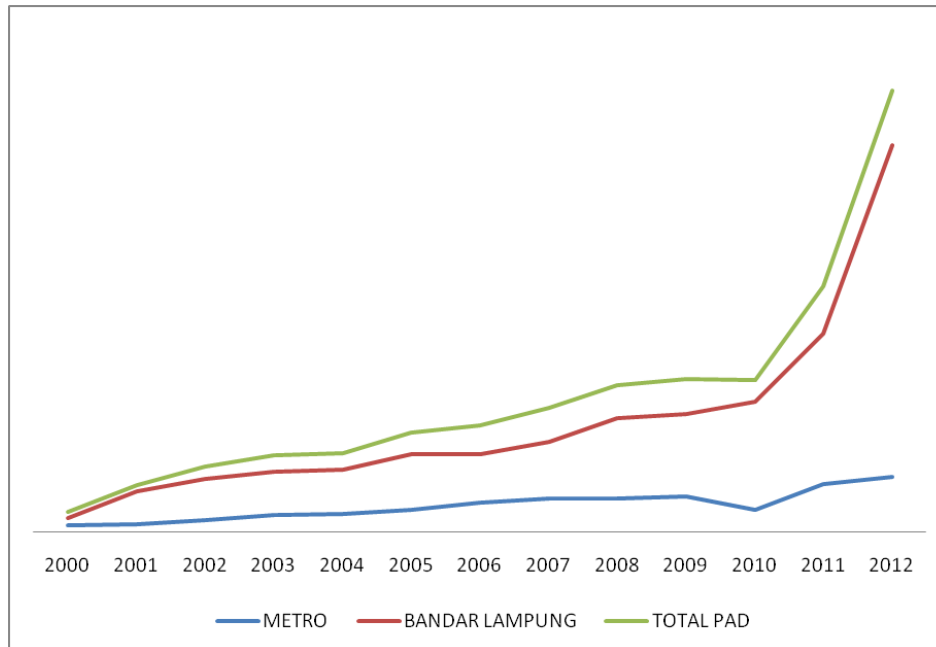
Provinsi Lampung merupakan daerah pemerintahan yang berada di ujung Pulau Sumatra yang dipimpin oleh seorang gubernur dengan pusat pemerintahan yang dibagi menjadi 13 kabupaten dan 2 Kota yaitu Kota BandarLampung dan Kota Metro. Berikut akan disajikan tabel yang akan menggambarkan total perolehan Pendapatan Asli Daerah Se-Kota Di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro selama Tahun 2000-2012.

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012 (dalam Jutaan Rupiah)**

TAHUN	SE-KOTA		TOTAL PAD
	BANDAR LAMPUNG	METRO	
2000	21.682,34	3.025,97	24.708,31
2001	25.696,67	7.948,01	33.644,68
2002	32.986,28	9.598,01	42.584,29
2003	36.511,79	12.098,05	48.609,84
2004	41.689,58	17.214,30	58.903,88
2005	49.073,49	18.703,17	67.776,66
2006	52.537,25	22.343,36	74.880,61
2007	55.540,34	24.541,92	80.082,26
2008	70.660,00	27.372,52	98.032,52
2009	77.731,00	29.045,20	106.776,20
2010	82.628,00	65.802,90	148.430,90
2011	116.044,00	46.822,00	162.866,00
2012	202.920,00	50.160,00	253.080,00

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2012*

**Grafik 1. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) BandarLampung, Metro dan Se-Kota Provinsi Lampung Tahun 2000-2012 (dalam Jutaan Rupiah)**



*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2012*

Tabel 1 dan grafik 1 menjelaskan tentang perolehan PAD Se-Kota Di Provinsi Lampung tahun 2000-2012 yaitu Kota BandarLampung dan Kota Metro yang secara keseluruhan terus mengalami peningkatan penerimaan terbesar dari sektor pajak dan retribusi daerah. Kota BandarLampung selama tahun 2000-2012 dipimpin oleh tiga era kepemimpinan kepala daerah yaitu pada tahun 2000-2004 kota BandarLampung dipimpin oleh Drs. Suharto dengan total perolehan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2000 sebesar Rp 21.682.970.000 hingga tahun 2004 sebesar Rp 41.689.580.000 dan pada tahun 2005-2009 dipimpin oleh Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd dengan total perolehan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2005 sebesar Rp 49.073.490.000 hingga tahun 2009 sebesar Rp 77.731.000.000 serta pada tahun 2010-2012 kota Bandar Lampung dipimpin oleh

Drs. Hi.Herman HN dengan total perolehan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2010 sebesar Rp 82.628.000.000 hingga 2012 sebesar Rp 202.920.000.000. Selama tiga era kepemimpinan kepala daerah kota Bandar Lampung mengalami peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan terutama pada era kepemimpinan Drs. Hi.Herman HN yang memimpin kota Bandar Lampung selama tahun 2010 hingga sekarang. Sedangkan Kota Metro selama tahun 2000-2012 dipimpin oleh dua era kepemimpinan kepala daerah yaitu pada tahun 2000-2004 kepemimpinan Herman Sanusi dengan total perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah pada tahun 2000 sebesar Rp 3.025.970.000 hingga tahun 2004 sebesar Rp 17.214.000.000 dan tahun 2005-2012 Hi.Lukman Hakim dengan total perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah pada tahun 2005 sebesar Rp 18.703.170.000 hingga tahun 2012 sebesar Rp 50.160.000.000.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah merupakan sumber kekayaan terbesar suatu daerah yang dapat digunakan untuk proses percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Ernawati, 2010). Besarnya penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi pada proses pertumbuhan ekonomi daerah (Amiel et al., 2010).

Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 2003). Serupa dengan pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan daerah yang akan dikelola daerah untuk proses percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (Ernawati, 2010).

Pendapatan BUMD merupakan hasil perusahaan milik daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Halim, 2004). Pengalokasian sumber daya fiskal yang baik termasuk pendapatan BUMD akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional (Zhang dan Zou, 1997).

Demikian pula dengan pendapatan lain-lain daerah yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim, 2004). Pengalokasian pendapatan lain-lain daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah juga akan berpengaruh pada pertumbuhan suatu daerah tersebut (Zulyanto, 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan keseluruhan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi suatu negara atau suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan

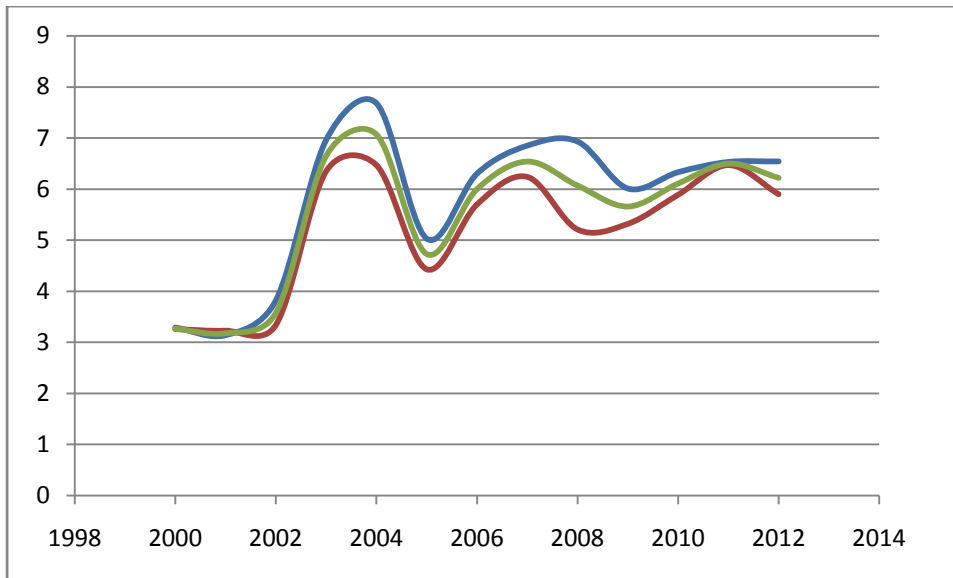
pekerjaan yang baru yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi didalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

**Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012 (Dalam Persen)**

TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SE-KOTA		RATA-RATA LAJU PDRB KOTA
	BANDAR LAMPUNG	METRO	
2000	3,29	3,26	3,27
2001	3,14	3,23	3,18
2002	3,82	3,34	3,58
2003	6,96	6,35	6,65
2004	7,68	6,47	7,07
2005	5,03	4,43	4,73
2006	6,30	5,70	6
2007	6,85	6,24	6,54
2008	6,93	5,21	6,07
2009	6,01	5,32	5,66
2010	6,33	5,89	6,11
2011	6,53	6,47	6,5
2012	6,54	5,90	6,22

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012*

**Grafik 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Kota dan Rata-rata Laju PDRB Kota Metro Tahun 2000-2012 (Dalam Persen).**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012*

Berdasarkan Tabel 2 yang disajikan di atas tentang laju pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung tahun 2000-2012 yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro pertumbuhan yang berfluktuatif . Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung dimulai pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebesar 3,29%, tahun 2003 sebesar 6,96%, tahun 2006 sebesar 6,30%, tahun 2009 sebesar 6,01% dan tahun 2012 sebesar 6,54%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Metro mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dimulai pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebesar 3,29%, tahun 2003 sebesar 6,35%, tahun 2006 sebesar 5,70%, tahun 2009 sebesar 5,32% dan tahun 2012 sebesar 5,90%.

Penelitian ini memperluas penelitian dari Ernawati (2009) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Penelitian ini telah menambah dua variabel yang berbeda dari penelitian Ernawati (2009) yaitu pendapatan BUMD dan Lain-Lain PAD

yang sah, penelitian ini mengambil Kota Metro dan Kota Bandar Lampung karena merupakan salah satu pusat pemerintahan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut

**“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD Dan Pendapatan Lain Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
3. Apakah Pendapatan BUMD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
4. Apakah Pendapatan lain daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.



### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012.